

ANALISIS PENGARUH DAU, DAK, DAN DBH TERHADAP IPM DI KABUPATEN/KOTA EKS KARESIDENAN KEDU TAHUN 2012-2016

ANALYSIS OF THE EFFECT OF DAU, DAK, AND DBH TO HDI IN FORMER KEDU RESIDENCY DISTRICTS / CITIES 2012-2016

¹ Puji Lestari, ² Sudati Nur Sarfiah, ³ Panji Kusuma Prasetyanto
Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia
lestarit629@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap indeks pembangunan manusia Di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu Tahun 2012-2016. Indeks pembangunan manusia sebagai variabel dependen, sedangkan dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil sebagai variabel independen. Penelitian ini menggunakan analisis data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM). Hasil menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia mampu dijelaskan oleh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil secara simultan, selanjutnya indeks pembangunan manusia dipengaruhi signifikan oleh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil secara simultan. Namun secara parsial menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, sedangkan dana alokasi khusus dan dana bagi hasil berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Kata kunci: dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, indeks pembangunan manusia

Abstract

This study aims to analyze the effect of general allocation funds, special allocation funds, and profit sharing funds on the human development index in the former Kedu Residency districts / cities in 2012-2016. Human development index as the dependent variable, while general allocation funds, special allocation funds, and profit sharing funds as independent variables. This research uses panel data analysis with the approach of Fixed Effect Model (FEM). The results show that human development index is able to be explained by general allocation funds, special allocation funds, and simultaneous revenue-sharing funds, then the human development index is significantly influenced by general allocation funds, special allocation funds, and profit sharing funds simultaneously. But partially shows that general allocation funds have a positive and significant effect on the human development index, while special allocation funds and profit sharing funds have a positive and not significant effect on the human development index.

Keywords: general allocation funds, special allocation funds, profit sharing funds, human development index.

PENDAHULUAN

Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan bukan alat dari pembangunan. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat dari seberapa besar permasalahan mendasar di masyarakat dapat teratasi. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi kemiskinan, pengangguran, gizi buruk, dan buta huruf. Berbagai ukuran pembangunan manusia telah dibuat namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran standar yang dapat membandingkan antar wilayah atau antar negara. Untuk itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks (HDI) (BPS, 2009).

IPM merupakan sebuah indeks komposit (gabungan) dari indeks pendidikan, kesehatan, dan daya beli yang diharapkan dapat mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia yang tercermin dengan penduduk yang berpendidikan, sehat dan berumur panjang, keterampilan serta mempunyai pendapatan untuk layak hidup (BPS, 2012). Peningkatan kualitas manusia pada suatu wilayah atau daerah melalui pembangunan manusia memiliki kontribusi yang besar untuk menentukan keberhasilan pembangunan dan pengelolaan di wilayahnya, karena dengan

peningkatan kualitas manusia yang tercermin dari IPM diharapkan mampu menunjang pembangunan di berbagai bidang. Eks karesidenan Kedu merupakan satuan administratif yang terdiri dari 1 kota dan 5 kabupaten yaitu Kota Magelang dan Kabupaten Magelang, Wonosobo, Temanggung, Purworejo, dan Kebumen. Indeks Pembangunan Manusia di Eks Karesidenan Kedu dari tahun 2012-2016 selalu mengalami peningkatan, walaupun selalu mengalami peningkatan tetapi nilai tersebut masih dalam kategori sedang yaitu nilai IPM antara 60,0-69,9. Meningkatnya nilai IPM setiap tahun dari tahun 2012-2016, jika pada tahun 2015 nilai IPM sebesar 68,92 meningkat pada tahun 2016 menjadi sebesar 69,48. Meskipun demikian, angka tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah pada tahun 2016 yaitu sebesar 74,02 (BPS, 2018).

Indeks pembangunan manusia pada setiap Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Kedu dari 2012-2016 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Capaian nilai IPM di setiap Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Kedu terlihat bahwa pada tahun 2016 nilai IPM Kota Magelang sebesar 77,16 dan nilai IPM kabupaten Purworejo sebesar 70,66 yang menunjukkan

pembangunan manusia dalam kategori tinggi yaitu antara 70,0-79,9. Sedangkan nilai IPM Kabupaten Magelang, Temanggung, Kebumen, dan Wonosobo masih berada dalam pembangunan manusia kategori IPM sedang yaitu antara 60,0-69,9.

Nilai IPM suatu daerah tentunya sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan internal pemerintah daerah. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung aspek pembangunan manusia, sejatinya dapat dilihat dari proporsi anggaran pemerintah untuk pembangunan sector pendidikan dan kesehatan (Arsyad, 2010). Dengan demikian besarnya proporsi anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk kedua sektor tersebut mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap aspek pembangunan manusia (BPS Kabupaten Magelang, 2016). Apalagi di era desentralisasi seperti sekarang ini, adanya pelimpahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom (UU Nomor 32 Tahun 2004), mengindikasikan bahwa pemerintah daerah diharapkan mampu menggali serta memanfaatkan sumber daya daerah masing-masing dan dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penerapan desentralisasi fiskal memberikan konsekuensi-konsekuensi, dimana daerah dituntut mampu membiayai pengeluaran daerah menggunakan pendapatan asli daerah tetapi tidak semua daerah mampu melakukan hal tersebut. Ini menyebabkan pembangunan tidak merata, mengatasi hal

tersebut, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Perimbangan. Dana perimbangan berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah atau desentralisasi. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, dana perimbangan terdiri atas, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Membaiknya penerimaan daerah akan berkontribusi pada meningkatnya kualitas kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan IPM. Semakin banyak pendapatan yang dihasilkan oleh daerah, membuat daerah mampu membiayai dan memenuhi keperluan yang diharapkan masyarakat (Christy dan Adi, 2009). Meningkatnya DAU, DAK, dan DBH memungkinkan adanya peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan IPM jika dana tersebut dialokasikan untuk sektor-sektor yang dapat meningkatkan IPM seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Dana alokasi Umum (DAU) yang bersumber dari pusat merupakan pengalokasian dana dengan tujuan pembiayaan pengeluaran dan kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Hal ini berarti terjadi transfer dari pusat kepada daerah, dan pemerintah daerah bisa memberikan masyarakat pelayanan lebih baik dengan dana ini sehingga

meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan standar kehidupan masyarakat, dan menciptakan hidup sehat dan harapan hidup yang lebih panjang (Harahap, 2011).

Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang digunakan untuk menjalankan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah (Harahap, 2011). Pengelolaan DAK yang dilakukan dengan baik, akan mampu memperbaiki pelayanan sarana prasarana kesehatan, mutu pendidikan serta mengurangi kerusakan infrastruktur. Sedangkan, Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Harahap, 2011).

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti ingin melakukan penelitian yang bertujuan untuk melihat apakah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus

(DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Kedu tahun 2012-2016.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel terikat (Y) yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan variabel bebas yaitu Dana Alokasi Umum (DAU)(X1), Dana Alokasi Khusus (DAK)(X2), dan Dana Bagi Hasil (DBH) (X3).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen di dinas terkait. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana data diperoleh dari perhitungan data yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Teknik Analisis Data

1. Analisis Regresi Data Panel

Model regresi data panel atau *pooled data* merupakan penggabungan

antara data *cross-section* dan data *time series*, dapat digambarkan dengan fungsi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana :

Y : Variabel Dependent

α : Konstanta

x_1, x_2, x_3 : Variabel

Independen

i : *Cross section*

t : *time series*

b_1, b_2, b_3 : Koefisien Regresi e *error term*

2. Uji F

Uji statistik F pada dasarnya dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama

mempunyai pengaruh terhadap variabel tak bebas (Kuncoro, 2011:82).

3. Uji R^2

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Jika nilai R^2 kecil (mendekati nol), berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas, maka dapat disimpulkan antara variabel independen dan (mendekati 10%)

keterkaitan. Jika nilai R^2 mendekati 1 (satu), berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen, maka dapat disimpulkan antara variabel independen dan variabel dependen ada keterkaitan (Kuncoro, 2011)

4. Uji t

Menurut Kuncoro (2011) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individu dalam menerangkan variasi variabel terikat. Dalam melakukan pengujian t maka dapat digunakan rumus sebagai berikut:

Dimana:

b = koefisien variabel bebas

Sb = standar deviasi (1%, 5%, 10%)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Analisis Data

a. Regresi Data Panel

Dari hasil regresi data panel dengan menggunakan program Eviews 10, diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = -152.6366 + 7.741223 \text{ LN}(X_1) + 0.118201 \text{ LN}(X_2) + 0.261007 \text{ LN}(X_3) + e$$

Berdasarkan hasil

perhitungan diatas maka hasil koefisien regresi dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar -152.6366 menyatakan bahwa jika semua variabel independen yaitu X1, X2, dan X3 tidak memiliki pengaruh terhadap variable dependen, maka indeks pembangunan manusia mengalami penurunan sebesar 152.6366%.
- Nilai koefisien variabel dana alokasi umum (X1) adalah sebesar 7.741223 yang mempunyai arti bahwa ketika terjadi kenaikan variabel dana alokasi umum sebesar 1%, maka akan terjadi kenaikan indeks pembangunan manusia (variabel dependen Y) sebesar 7.741223%, dengan asumsi variabel independen yang lain yaitu X2 dan X3 tetap (*ceteris paribus*).
- Nilai koefisien variabel dana alokasi khusus (X2) adalah sebesar 0.118201 yang mempunyai arti bahwa ketika terjadi kenaikan variabel dana alokasi khusus sebesar 1%, maka akan terjadi kenaikan indeks pemabangunan manusia(variabel dependen Y) sebesar 0.118201%, dengan asumsi variabel independen yang lain tetap yaitu X1 dan X3(*ceteris paribus*).
- Nilai koefisien variabel dana bagi hasil (X3) adalah sebesar 0.261007 yang mempunyai arti bahwa ketika terjadi kenaikan variabel dana bagi hasil sebesar 1%, maka akan terjadi kenaikan indeks pembangunan manusia (variabel

dependen Y) sebesar 0.261007%, dengan asumsi variabel independen yang lain yaitu X1 dan X2 tetap (*ceteris paribus*).

b. Uji F

Dari hasil analisis regresi diperoleh nilai F hitung lebih besar dari F tabel yaitu $391.5301 > 3.3541$ yang berarti bahwa H_a diterima dan H_o ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

c. Uji R^2

Nilai R-square (R^2) sebesar 0.993340, jika nilai R-square semakin mendekati angka satu maka model ini akan semakin baik. Dengan demikian maka variabel indeks pembangunan manusia mampu dijelaskan dengan variabel dana aloksi khusu, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil sebsar 99.33%, sedangkan sisanya 100% - 99,33% atau sebesar 0.67% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

d.

Uji t

1. Pengujian terhadap variabel

Dana Alokasi Umum (DAU) (X1)

Dari hasil analisis regresi diperoleh, nilai t hitung variabel X1 yaitu 7.257435, Menggunakan nilai *degree of freedom* (df) = $30-3 = 27$, menggunakan taraf signifikansi 95% ($\alpha = 5\%$), kemudian nilai t tabel sebesar 1.7033. Kesimpulannya yaitu nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $7.257435 > 1.7033$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti ada pengaruh yang signifikan dari dana alokasi umum terhadap indeks pembangunan manusia.

2. Pengujian terhadap variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) (X2)

Dari hasil analisis regresi diperoleh, nilai t hitung variabel X1 yaitu 0.621024, Menggunakan nilai *degree of freedom* (df) = $30-3 = 27$, menggunakan taraf signifikansi 95% ($\alpha = 5\%$), kemudian nilai t tabel sebesar 1.7033. Kesimpulannya yaitu nilai t hitung lebih kecil dari t tabel yaitu $0.621024 < 1.7033$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti tidak ada pengaruh yang signifikan dari dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia.

3. Pengujian terhadap variabel Dana Bagi Hasil (DBH) (X3)

Dari hasil analisis regresi diperoleh, nilai t hitung variabel X1 yaitu 0.535039, menggunakan nilai *degree of freedom* (df) = $30-3 = 27$, menggunakan taraf signifikansi 95% ($\alpha = 5\%$), kemudian nilai t tabel sebesar 1.7033.

2. Pembahasan

a. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Eks Karesidenan Kedu

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Artinya kenaikan dana alokasi dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Lilis Setyowati dan Yohana Kus Suparwati (2012) yang menunjukkan variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dana alokasi umum di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan kedu selalu mengalami kenaikan setiap tahun dengan jumlah pengalokasian dana alokasi umum yang besar jika dibandingkan dengan dana alokasi khusus dan dana bagi hasil. Kenaikan dana alokasi umum diikuti dengan kenaikan indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu dari tahun 2012-2016, dilihat dari Indikator indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan kedu yang mengalami kenaikan. Hal

tersebut mengindikasikan penggunaan dana alokasi diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan fiskal daerah yang merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum antara lain adalah penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan infrastruktur, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

b. pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Eks Karesidenan Kedu

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Artinya kenaikan dana alokasi khusus mampu menaikkan indeks pembangunan manusia tetapi tidak signifikan.

Proporsi dana alokasi khusus yang diterima Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Kedu dari 2012-2016 masih relatif rendah jika dibandingkan dengan dana alokasi umum. Pada dasarnya tujuan dana alokasi khusus untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dengan beberapa arah kegiatan.

Proporsi dana alokasi khusus yang relatif rendah yang diterima di Kabupaten/Kota

Eks Karesidenan Kedu tahun 2012-2016 yang penggunaannya untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur jalan, bidang infrastruktur irigasi, bidang infrastruktur air minum, bidang infrastruktur sanitasi, bidang prasarana pemerintah desa, bidang saran dan prasarana kawasan perbatasan, bidang kelautan dan perikanan, bidang pertanian, bidang keluarga berencana, bidang kehutanan, bidang sarana dan prasarana daerah tertinggal, bidang sarana perdagangan, bidang energi perdesaan, bidang perumahan dan permukiman, dan bidang keselamatan transportasi darat. Menjadikan dana alokasi khusus di Eks Karesidenan Kedu belum menitikberatkan pada belanja-belanja yang menunjang peningkatan akses masyarakat akan pendidikan, kesehatan dan unsur ekonomi.

Dengan demikian membuat variabel dana alokasi khusus menjadi tidak signifikan mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu tahun 2012-2016. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Siswadi (2015) yang menunjukkan variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan tidak signifikan secara langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

c. Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH)

Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Eks Karesidenan Kedu

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Artinya kenaikan dana bagi hasil mampu menaikkan indeks pembangunan manusia tetapi tidak signifikan.

Penerimaan dana bagi hasil di kabupaten/kota Eks Karesidenan Kedu pada tahun 2012-2016 menjadi yang terendah jika dibandingkan dengan dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Di samping rendahnya dana bagi hasil yang diperoleh ada beberapa komponen DBH yang penggunaannya ditentukan oleh negara berdasarkan peraturan terkait (earmarking). Komponen tersebut antara lain DBH kehutanan yang berasal dari dana Reboisasi digunakan untuk rehabilitasi hutan dan lahan, DBH migas digunakan untuk tambahan anggaran pendidikan dasar. Di sisi lain penerimaan dana bagi hasil dari Cukai Hasil Tembakau paling sedikit 50% digunakan untuk mendanai program/kegiatan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi dibidang cukai serta pemberantasan barang kena cukai ilegal

Hal tersebut membuat total DBH yang dapat digunakan secara fleksibel melalui output belanja modal dalam meningkatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan

kesejahteraan masyarakat untuk peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Kedu menjadi sangat terbatas sehingga membuat variabel DBH menjadi tidak signifikan mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Kedu tahun 2012-2016. Hasil ini didukung oleh penelitian Decta Pitron Lugastro (2013) yang menunjukkan variabel Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

d. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berdasarkan hasil analisis di atas, menunjukkan bahwa dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil tahun 2012-2016 secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil diikuti dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia.

Penerimaan dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil

tidak bisa lepas dari Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Kedu karena merupakan penerimaan dalam rangka otonomi daerah untuk mencukupi kebutuhan dalam penyelenggaraan kebutuhan pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat. ketiga komponen tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, mengingat tujuan dari masing-masing sumber tersebut saling mengisi dalam proses implementasi otonomi daerah. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Riva Ubar Harahap (2011) yang menunjukkan pengujian secara simultan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan kedu Tahun 2012-2016. Artinya kenaikan dana alokasi dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia.
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan kedu Tahun 2012-2016. Artinya kenaikan dana alokasi khusus mampu menaikkan

indeks pembangunan manusia tetapi tidak signifikan.

3. Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan kedu Tahun 2012-2016. Artinya kenaikan dana bagi hasil mampu menaikkan indeks pembangunan manusia tetapi tidak signifikan.
4. Dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan kedu Tahun 2012-2016.

Saran

1. Penggunaan dana alokasi umum oleh pemerintah daerah sebaiknya semakin ditekan untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Dengan pengawasan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat dan didukung masyarakat untuk menghindari penggunaan dana alokasi umum yang tidak sesuai, dengan cara menetapkan/menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk

mendatangi pembiayaan standar pelayanan minimum kemudian menyampaikannya kepada KPPN disertai spesimen tanda tangan pejabat bersangkutan.

2. Dana alokasi khusus sebaiknya digunakan secara dominan untuk kegiatan utama pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, bukan hanya untuk kegiatan pendukung. Harus adanya prinsip kehati-hatian dan perlu melakukan pengawasan berkala terkait penggunaan anggaran dilakukan dengan kepala daerah menyusun konsep daftar isian pelaksanaan anggaran kemudian disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Setempat.
3. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana bagi hasil dengan sebaik mungkin untuk pembangunan daerah. Perlu adanya rencana pengalokasian dana bagi hasil yang tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat dalam pengadaan program pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi. Perlu adanya pengawasan secara berkala untuk menghindari adanya penggunaan dana bagi hasil yang tidak sesuai, melalui Meteri Teknis, Menteri keuangan

melakukan pemantaun dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran yang didanai dari dana bagi hasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansofino, dkk. 2016. *Buku Ajar Ekonometrika*. Yogyakarta: Deepublish.
- Badan Pusat Statistik. 2009. *Indeks Pembangunan Manusia*. BPS: Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. 2012. *Indeks Pembangunan Manusia*. BPS: Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Indeks Pembangunan Manusia*. BPS: Kabupaten Magelang.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Indeks Pembangunan Manusia*. BPS: Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin*. BPS: Jawa Tengah.
- Basuki, Agus Tri dan Imamudin Yuliadi. 2015. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*.

Yogyakarta: Mitra Pustaka Nurani.

Christy, Fhino Andrea dan Priyo Hari Adi.
2009. *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia. The 3rd National Conference UKWMS Surabaya.*

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
<http://www.djpk.kemenkue.go.id>.
(2018).

Pitron, Decta Lugastoro. 2013.
Analisis Pengaruh PAD dan Dana Ilmu Ekonomi dan Manajemen Volume 5 Nomor 3.
April 2009.

Nuryanto dan Zulfikar Bagus Pambuko. 2018. *Eviews untuk Analisis Ekonometrika Dasar Aplikasi dan Intepretasi.*
Magelang: Unima Press.

Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode Tahun 2009-

2012. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Gujarati, Damodar N. Porter. 2006. *Dasar- Dasar Ekonometrika Jilid I*. Jakarta: Erlangga.

Harahap, Riva Ubar. 2010. *Pengaruh DAU, DAK, dan DBH Terhadap IPM pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera*. Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara.

Harahap, Riva Ubar. 2017. *Pengaruh DAU, DAK, dan DBH Terhadap IPM pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera*. Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara.

Hartono.2018. *Konsep Analisa Laporan Keuangan Dengan Pendektan Rasio dan SPSS*. Yogyakarta: Deepublish

Kuncoro, Mudrajad. 2011. *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.

Kusreni, Sri dan Sultan Suhab.

2009.

Kebijaksanaan APBD dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan.DIE-jurnal

Suparwati. 2012. *Pengaruh Perumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD Terhadap IPM dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah)*. Prestasi Vol. 1-Juni 2012.

Siswadi.2015. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Belanja Modal*. Vol. No 2. 2015.

Sugiyono.2016. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Suryani dan Hendryadi. 2015. *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004

- Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.* 12.3.1 2015.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999
Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Wahyu, I Putu Adita dan A.A.N.B Dwirandra. 2015. *Kemampuan Belanja model Memoderasi Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan SILPA pada IPM.* E-Junal Akuntansi Universitas Udayana
- Widarwanto, Antanasius, Erlina dan Idhar Yahya. 2014. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Bantuan Keuangan Daerah (BPK) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Belanja Pelayanan Dasar (BPD) Sebagai Moderating Variabel. Vol. 7 No. 2 Juli 2014.
- Yani, Ahmad. 2013. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Yusuf, Muri. 2014. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Kencana